

Optimalisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 7617:2013 Sebagai Instrumen Pelindungan Konsumen pada Produk Pakaian Bayi Impor = Optimization of Indonesian National Standard (SNI) 7617:2013 as a Consumer Protection Instrument for Imported Baby Clothing Products

Indira Maharani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920577274&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemberlakuan SNI wajib bagi pakaian bayi impor penting untuk menyaring produk yang tidak sesuai standar demi melindungi konsumen bayi dari risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi impor dan standardisasi pakaian bayi di Indonesia, serta peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam pengawasan SNI. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal berbasis analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya optimalisasi SNI 7617:2013, terutama dalam aspek biaya, proses sertifikasi, dan penguatan substansi teknis standar keamanan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran SNI juga perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk menyederhanakan proses sertifikasi, menekan biaya, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi.

.....The mandatory implementation of SNI for imported baby clothing is essential to filter out non-compliant products and protect infant consumers from health risks. This research aims to analyze import regulations and the standardization of baby clothing in Indonesia, as well as the roles of the Ministry of Trade and the Ministry of Industry in supervising SNI compliance. The method used is a doctrinal approach based on the analysis of laws and legal literature. The findings indicate the need to optimize SNI 7617:2013, particularly in terms of certification costs, procedures, and enhancement of technical safety standards. Supervision and legal enforcement regarding SNI violations also require strengthening. Therefore, the government is advised to simplify the certification process, reduce costs, and enhance oversight and law enforcement to protect.